

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an dan Terjemahan.

Buku-Buku :

- Abdul Qodir, Abd. Moqsith Ghazali, Imam Nakha'i, KH. Husein Muhammad, Marzuki Wahid, Faqihuddin. *Fiqh Anti Trafiking*. Diedit oleh Faqihuddin Abdul Khodir. Edisi Pertama. Cirebon: Fahmina Institute, 2006.
- Ahmed an-Na'im, Abdullahi. *Toward an Islamic Reformation Civil Libertis, Human Rights, and International Law*. Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Ancel, Marc. *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems*. London: Routledge & Kegan Paul, 1965.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Diedit oleh Y Rendy. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- . *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2011.
- . *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Asy-syarbini, Muhammad Khatib. *Mugni Al-Muhtaj*. Juz III. Beirut: Dar Al-Fikr, Tanpa Tahun.
- Atmasasmita, Romli. "Masalah Santunan terhadap Korban Tindak Pidana." *Majalah Hukum Nasional Departemen Kehakiman*, 1992.
- . *Sistem Peradilan pidana Kontemporer*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Bakhri, S.H., M.H., Syaiful. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, Teori, dan Praktik Peradilan*. Diedit oleh Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Effendi, Taufani Sukmana Evandri, A. Mansyur. *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, dan Proses Penyusunan/Aplikasi Ha-Kham (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.

- Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Lapian, L. M. Gandhi. “Aspek Hukum Penghapusan Trafiking (Perdagangan Manusia) Khususnya Wanita dan Anak.” In *Trafiking Perempuan dan Anak Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus: Sulawesi Utara*, diedit oleh L.M. Gandhi Lapian, Hetty A. Geru. 1 ed. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Marlina, Azmiati Zuliah, Dr. *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Diedit oleh Anna. Pertama. Bandung: PT. Refika Aditama, 2015.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Meuwissen. *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*. Diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta. Bandung: Reflika Aditama, 2009.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ketujuh. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Muhammad bin Husayn bin Umar, Abdurrahman bin. *Bughyat Al-Mustarsyidin*. tp: Dar Al-Fikr, Tanpa Tahun.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995.
- Nuraeny, Henny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Cetakan Pertama. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2016.
- . *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- O.S. Hiariej, Eddy. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009.
- . “Beberapa Catatan RUU KUHP dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana Terpadu.” In *Problematika Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2013.
- . *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.

- . *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012.
- Pangaribuan, Luhut M.P. *Hukum Acara Pidana Suatu Kompilasi Ketentuan Ketentuan KUHPA Serta dilengkapi dengan Hukum Internasional yang Relevan*. Jakarta: Djambatan, 2000.
- Pasek Dianta, I Made. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Rahman, Anita. “Pandangan Islam Terhadap Penjualan Anak Perempuan dan Hak Anak.” In *Trafiking Perempuan dan Anak Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus: Sulawesi Utara*², diedit oleh L.M. Gandhi Lopian, Hetty A. Geru. 1 ed. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Reksodipoetro, Mardjono. “Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peadilan Pidana.” In *Kumpulan Karangan Buku Ketiga*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- . “Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan).” In *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994.
- Sadli, Saparinah. “Viktimisasi Perempuan.” In *Trafiking Perempuan dan Anak Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus: Sulawesi Utara*, diedit oleh L.M. Gandhi Lopian, Hetty A. Geru. 1 ed. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Sinlaeloe, Paul. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Malang: Setara Press, 2017.
- Soedarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2006.
- . *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Bina Cipta, 1986.
- Soehino. *Ilmu Negara*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981.
- . *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- . *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru, 1983.

———. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP, 2009.

Syafaat, Rachmad. *Dagang Manusia*. Edisi Pertama, Jakarta: Laperia Pustaka Utama, 2003.

Wagiman, Zainal Abidin, Wahyu. *Praktik Kompensasi di Indonesia: Sebuah Kajian Awal*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW), 2007.

Wisnubroto. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, Tanpa Tahun.

Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2009 tentang Protokol Pencegahan, Penindakan, dan Penghukuman Pelaku Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Jurnal dan Skripsi :

Effendi, Erdianto. "Pemberantasan Perdagangan Orang Dengan Sarana Hukum Pidana." *Cita Hukum*. Vol 1, No. 1 (2016).

Ihsan, Muhammad. "Diyat Sebagai Pengganti Qishas Pada Jarimah Pembunuhan Sebab Pemaaf." *Legalite*, Vol. 1, No. 2 (2016).

Makhfudz, M. "Kajian Praktek Perdagangan Orang Di Indonesia." *Adil*. Vol. 4, No 1 (2015).

Muhammad, Hussein. "Kemiskinan dan Perempuan." *Swara Rahima* (2005).

O.S. Hiariej, Eddy. "Telaah Kritis Pertimbangan Mahkamah Agung Mengenai Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan MA No. Putusan MA No. 2608 K/PID/2006 dan 334 K/PID.SUS/2009)." *Dictum* (2013).

Rachman, Hanafi. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *FH UI*, 2012.

Supriyadi. "Penetapan Tindak Pidana sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-Undang Pidana Khusus." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*. Vol. 27, No. 3 (2015).

Wijayanta, Sandra Dini Febri Aristya, Kunthoro Basuki, Herliana, Hasrul Halili, Sutantu, Retno Supartinah, Tata. "Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep kebenaran Formal." *Mimbar Hukum* Vol. 22, No. 3 (2010).

Yunus, Firdaus M. "Kebebasan Dalam Filsafat Eksistensialisme Jean Paul Sartre." *Al-Ulum*, Vol. 11, No. 2 (2011).

Internet :

<https://business-law.binus.ac.id/2014/08/20/pemberian-restitusi-bagi-korban-tindak-pidana-dalam-sistem-peradilan-pidana-indonesia/>, Sofian, Ahmad. "Pemberian Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.", 2014, Diakses 7 Juli, 2019.

<https://ekbis.sindonews.com/read/1303706/33/bps-jumlah-pengangguran-di-indonesia-capai-687-juta-1525681109>, Fajriah, Lily Rusna, BPS: Jumlah Pengangguran di Indonesia Capai 6,87..., Diakses 9 Oktober, 2018.

<https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik> "Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik." *Institute For Criminal Justice Reform*. 2012. Diakses 7 September, 2019.

<https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2018/>., Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2018, Diakses 15 Januari, 2019.

<https://www.youtube.com/watch?v=Jcd2Hon5heQ&t=111s>., O.S. Hiariej, Eddy. Ketika memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara sengketa Pilpres pada tanggal 21 Juni 2019, Diakses 16 Agustus 2019.

<https://zulakrial.blogspot.com/2012/09/dasar-pembenaran-konsep-restitusi.html>, Akrial, Zul. "Dasar Pembetulan Konsep Restitusi Sebagai Suatu Pidana (Kajian Dalam Hukum Pidana Indonesia).", 2012, Diakses 7 Juli, 2019.